



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS
MELAYANI (WBBM)
2022**

**PENATAAN
SISTEM
MANAJEMEN
SDM**

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

**DALAM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI, UNIT KERJA
MELAKUKAN UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPADA PEGAWAI
(SEPERTI PENGIKUTSERTAAN PADA LEMBAGA PELATIHAN, IN-HOUSE
TRAINING, COACHING, ATAU MENTORING)**

Daftar Isi

1. Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko CRMO
2. Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko - Remedial.
3. Undangan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
4. ST Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
5. Sosialisasi dan Bimtek Kearsipan
6. Daftar Nama dan Jadwal Sosialisasi dan Bimtek Kearsipan
7. Permohonan tugas Belajar Hasri Puspita Ainun.pdf
8. Telaah Tugas Belajar Hasri Puspita Ainun



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1019/PW.01/09/2021

14 September 2021

Lamp. : Satu lembar

Perihal : Undangan Peserta

Kepada Yth.

Pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

(Daftar nama terlampir)

Di Tempat

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai tentang manajemen risiko sekaligus mendukung pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Inspektorat akan menyelenggarakan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko (*Certified Risk Management Officer /CRMO*) bagi para Auditor dan *Risk Officer*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi peserta pada kegiatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu-Jumat, 22 s.d 24 Sept 2021 dan Kamis, 30 Sept 2021

Waktu : Jadwal terlampir

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing

Untuk *Link Zoom* meeting dan *password* akan kami informasikan kemudian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur

Budi Achmad Djohari

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Panitera Mahkamah Konstitusi
3. Panitera Muda I, II, dan III
4. Kepala Biro/Pusat



Digital Signature
mk1821611727210908074005

Lamp : Undangan
Nomor : 1019/PW.01/09/2021
Tanggal : 14 September 2021

Daftar Peserta Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko
(*Certified Risk Management Officer /CRMO*)
Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

No.	Nama	Unit Kerja
1.	Arshinta Fitridiyani	Inspektorat **
2.	Surya Murni Pangesti	
3.	Dhita Cantika Megatania	
4.	Dian Dwi Hapsoro	
5.	Dwi Poesvitasari	
6.	Muhammad Rizki	
7.	Wijang Ardi Rahmadi	
8.	Amelia Desy Ratna Yuwita	
9.	Dillon Davin Zebadiah	
10.	M. Fadhel Fahrul Rozi.Z	
11.	Raditya Herdana	
12.	Andi Siti Chodijah Baso	
13.	Allita Prisantama	Biro Perencanaan dan Keuangan
14.	Yuana Sisilia	Biro Umum
15.	Erna Hasanah	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
16.	Aditya Yuniarti	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
17.	Tiara Agustina	Biro Humas dan Protokol
18.	Fithatue Amalia Fatla Aini	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
19.	Hadian Taofik Rochman	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
20.	Jeklin Indriani Br Purba	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
21.	Mardian Wibowo	Kepaniteraan



Tata Tertib
Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko
(*Certified Risk Management Officer /CRMO*)
Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2021

- 1 Peserta bergabung pada *link zoom* yang telah disediakan selambat-lambatnya 10 menit sebelum acara di mulai;
- 2 Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir yang telah disediakan;
- 3 Peserta menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan serta tidak menggunakan kaos (*T-Shirt*) pada saat kegiatan Bimtek berlangsung;
- 4 Peserta disarankan menggunakan Laptop/PC yang terhubung dengan koneksi internet yang stabil dan berada pada lokasi yang tidak terganggu (bising) ;
- 5 Peserta mengaktifkan kamera video pada Laptop/PC selama mengikuti kegiatan;
- 6 Peserta yang tidak mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung akan dianggap tidak hadir dan tidak diperkenankan mengikuti ujian sertifikasi;
- 7 Peserta menggunakan *virtual background* yang telah disediakan oleh panitia;
- 8 Peserta diharapkan menonaktifkan suara pada saat pemaparan materi sedang berlangsung;
- 9 Peserta yang akan bertanya dapat menggunakan mode " *Raise Hand*" atau memanfaatkan kolom *chat* yang tersedia.
- 10 Peserta mengikuti ujian secara tatap muka sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia yaitu pada Kamis, **30 September 2021**.



Jadwal Kegiatan *Certified Risk Manajement Officer*
Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

NO	HARI /TANGGAL	JAM	MATERI	PENGAJAR
1	Rabu 22 September 2021	08.00-08.30	Pembukaan	Dr. Ir. Rudolf Lumbantobing, MM,CRMO
		08.30 – 10.00	Business Quantitative	
		10.00 – 10.15	Break	
		10.15 – 12.00	Business Quantitative	
		12.00 – 13.00	ISHOMA	
		13.00 – 15.00	Business Quantitative	
		15.00 – 15.30	Break	
		15.30 - Selesai	Briefing Uji Sertifikasi LSPMR	LSPMR
2	Kamis 23 September 2021	09.00 – 10.00	Basic Concept Risk Management	Ricardo Pardede, MH,CRMP,CIPMP,CISCP,BCMCP, QIA, CRGP
		10.00 – 10.15	Break	
		10.15 – 12.00	Introduction Enterprise Risk Management	
		12.00 – 13.00	ISHOMA	
		13.00 – 15.00	Melakukan Identifikasi Risiko	
		15.00 – 15.30	Break	
		15.30 – 18.00	Melakukan Pengukuran Risiko	
3	Jumat 24 September 2021	09.00 – 10.00	Melakukan Pengukuran Risiko	Ricardo Pardede, MH,CRMP,CIPMP,CISCP,BCMCP, QIA, CRGP
		10.00 – 10.15	Break	
		10.15 – 11.30	Melakukan Pemetaan Risiko	
		11.30 – 13.00	ISHOMA	
		13.00 – 15.00	Mengembangkan Respon/Perlakuan Risiko	
		15.00 – 15.30	Break	
		15.30 – 17.00	Monitoring dan Pelaporan Risiko	
		17.00 – 18.00	Latihan Soal / Simulasi Ujian	
4	Kamis 30 September 2021	08.00 s.d selesai	Ujian Sertifikasi Keahlian	LSPMR





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS Nomor 480/2000/11/2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Manajemen Risiko, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Inspektorat telah menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko (*Certified Risk Management Officer*);
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada peserta yang belum berhasil menyelesaikan ujian dipandang perlu menyertakan kembali dalam pelatihan dan ujian tertulis yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko (*Certified Risk Management Officer*);
- c. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada Pegawai yang ditunjuk dalam Surat ini, untuk mengikuti pelatihan dan ujian Bisnis Quantitative pada kegiatan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko (*Certified Risk Management Officer*).
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Nota Dinas Inspektur Nomor 996/2900/PW.01/11/2021 tertanggal 12 November 2021.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Daftar Nama Terlampir**
- Untuk : 1. Mengikuti Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko (*Certified Risk Management Officer*) untuk modul Bisnis Quantitative pada :
Tanggal : Terlampir
Tempat : Gedung LSPMR, Gedung Biru Lt 4, Jalan Kapt. Tendean
No. 1 Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
3. Melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 16 November 2021
Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Digital Signature
mk-850670006211116114050

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 480/2000/11/2021

Tanggal : 16 November 2021

**DAFTAR PESERTA UJIAN REMEDIAL
SERTIFIKASI KEAHLIAN MANAJEMEN RISIKO (CERTIFIED RISK MANAGEMENT OFFICER)**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Unit Kerja	Waktu
1.	Dewi Hastuti, S.I.Kom., M.M	19820222 200604 2 002	Penata Tk I (III/d)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepaniteraan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Pelatihan, 22 Nov 2021 (Daring) Ujian, 30 Nov 2021 (Tatap Muka)
2.	R.A. Indah Apriyanti, S.S.	19800426 200901 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Sekretariat Tetap AACC	Biro Humas dan Protokol	Pelatihan, 22 Nov 2021 (Daring) Ujian, 30 Nov 2021 (Tatap Muka)
3.	Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit, S.E., M.A.A.C	19851028 200912 1 003	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri	Biro Humas dan Protokol	Pelatihan, 22 Nov 2021 (Daring) Ujian, tanggal menyusul





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1107/KP.02.00/09/2021 Jakarta, 28 September 2021
Lampiran : 2 berkas
Perihal : Undangan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Yth, **Para Pegawai**
(Daftar Terlampir)
di Jakarta

Dengan hormat, sehubungan dengan upaya meningkatkan kompetensi dan pengetahuan Pegawai mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan mengadakan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar melalui Model *Blended Learning*. Mohon kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr. dalam kegiatan dimaksud, pada :

Tanggal : 1.11 s.d. 20 Oktober 2021 (Daring melalui elearning.lkpp.go.id);
2.26 s.d. 27 Oktober 2021 (Tatap Muka di Aula Lantai Dasar Gedung MKRI);
3.28 s.d. 29 Oktober 2021 (Ujian Sertifikasi di Gedung LKPP)
Tempat : 1.Daring melalui elearning.lkpp.go.id;
2.Aula Lantai Dasar Gedung MKRI;
3.Gedung LKPP Jakarta Selatan.

Peserta Pelatihan dan Ujiian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat mendaftar secara mandiri melalui ppsdm.lkpp.go.id paling lambat 6 Oktober 2021 dengan mengunggah Surat Tugas mengikuti pelatihan (Terlampir).

Demikian kami sampaikan, demi tertib dan tercapainya tujuan kegiatan, Peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pelatihan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n Sekretaris Jenderal,
Kepala Biro SDM dan Organisasi
Teguh Wahyudi

Tembusan :
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
[mk322145517210928034238](https://www.mkri.id/verification/mk322145517210928034238)

Lampiran 1. Surat Undangan

Nomor : 1107/KP.02.00/09/2021

Tanggal : 28 September 2021

Daftar Peserta Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Elisabeth | 21. Agusweka Poltak Siregar |
| 2. Sigit Purnomo | 22. Razi Fajari Farghani |
| 3. Rahmadiani Putri Nilasari | 23. Ika Kurnia Aryani |
| 4. Muhammad Halim | 24. Ariesty Kartika |
| 5. Jeffry Irwansyah | 25. Muhammad Aussie |
| 6. Puspita Linda Laras Priska | 26. Adam Ghuzalee Ramadhan |
| 7. Lina Herlina | 27. Agung Wisnu Laksono |
| 8. Arshinta Fitriyani | 28. Afrianto Amri |
| 9. Dede Agustina Naibaho | 29. Billy Barlian |
| 10. Ina Zuchriyah | 30. Bianca Kartika Sari |
| 11. Yossy Adriva | 31. Rd. Muhammad Billy Almalik |
| 12. Mutia Fria Darsini | 32. Aris Wahyu Hajianto |
| 13. Mohammad Arief | 33. Tiara Agustina |
| 14. Kin Isura Ginting | 34. Elin Asrofah Qibtiah |
| 15. Yuni Sandrawati | 35. Surya Murni Pangesti |
| 16. Nerpi Juita Sinurat | 36. Wibisana Ferry |
| 17. Nahar Slamet | 37. Erna Hasanah |
| 18. Santhy Kustrihardiani | 38. Jeklin Indriani Br Purba |
| 19. Bobi Arianto | 39. Paulus Rudy Calvin Sinaga |
| 20. Mochamad Arafah | 40. Yahya Amarullah Taufik |





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS Nomor 381/2000/09/2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM tentang pemahaman regulasi PBJP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk mendorong kebijakan Jabatan Fungsional Penyedia PBJ, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal melalui Biro SDM dan Organisasi akan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menyelenggarakan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas untuk menghadiri kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Surat LKPP Nomor 20219/Pusdiklat/09/2021 bertanggal 23 September 2021 tentang Permohonan Fasilitasi dan Ujian Sertifikasi PBJ.

Memberi Tugas :

- Kepada : **Daftar Nama Terlampir**
- Untuk : 1. Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar secara *Blended Learning* pada :
- Tanggal : 1. 11 s.d. 20 Oktober 2021 (*Online* Mandiri)
2. 26 s.d. 27 Oktober 2021 (Tatap Muka)
3. 28 s.d. 29 Oktober 2021 (Ujian Sertifikasi)
- Tempat : 1. Melalui Daring
2. Aula Lantai Dasar Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
3. Gedung LKPP
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.
3. Melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 28 September 2021
Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk-983457316210928100630

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 381/2000/09/2021
Tanggal : 28 September 2021

Daftar Peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Elisabeth | 21. Agusweka Poltak Siregar |
| 2. Sigit Purnomo | 22. Razi Fajari Farghani |
| 3. Rahmadiani Putri Nilasari | 23. Ika Kurnia Aryani |
| 4. Muhammad Halim | 24. Ariesty Kartika |
| 5. Jeffry Irwansyah | 25. Muhammad Aussie |
| 6. Puspita Linda Laras Priska | 26. Adam Ghuzalee Ramadhan |
| 7. Lina Herlina | 27. Agung Wisnu Laksono |
| 8. Arshintia Fitridiyani | 28. Afrianto Amri |
| 9. Dede Agustina Naibaho | 29. Billy Barlian |
| 10. Ina Zuchriyah | 30. Bianca Kartika Sari |
| 11. Yossy Adriva | 31. Rd. Muhammad Billy Almalik |
| 12. Mutia Fria Darsini | 32. Aris Wahyu Hajianto |
| 13. Mohammad Arief | 33. Tiara Agustina |
| 14. Kin Isura Ginting | 34. Elin Asrofah Qibtiah |
| 15. Yuni Sandrawati | 35. Surya Murni Pangesti |
| 16. Nerpi Juita Sinurat | 36. Wibisana Ferry |
| 17. Nahar Slamet | 37. Erna Hasanah |
| 18. Santhy Kustrihardiani | 38. Jeklin Indriani Br Purba |
| 19. Bobi Arianto | 39. Paulus Rudy Calvin Sinaga |
| 20. Mochamad Arafah | 40. Yahya Amarullah Taufik |





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 557/TU.01/05/2022

12 Mei 2022

Hal : Undangan

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

(daftar nama terlampir)

di tempat

Dengan hormat, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Biro Umum akan melaksanakan kegiatan **Sosisalisasi dan Bimtek Kearsipan: Budaya Sadar Tertib Arsip Dalam Rangka Pelayanan Prima** yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Jumat, 13 Mei 2022

pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

tempat : Aula Lantai Dasar, Gedung 1 Mahkamah Konstitusi.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dengan tepat waktu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum,

Elisabeth



Digital Signature
mk-907749265220512104723

Lampiran Undangan
Nomor : 557/TU.01/05/2022
Tanggal : 12 Mei 2022

**DAFTAR NAMA PESERTA
SOSIALISASI DAN BIMTEK KEARSIPAN
BUDAYA SADAR TERTIB ARSIP DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2022**

1	Elisabeth	33	Riska Aprian
2	Kasiman	34	Indra Pandu Wibowo Purwanto
3	Sunarti	35	Rika Dewi Andryani
4	Ardli Nuryadi	36	Siwi Kartikasari
5	Kin Isura Ginting	37	Sri Rustiningrum
6	Medi Kurniadi	38	Basuki
7	Erna Hasanah	39	Faizal Fajar Insani
8	Elling Masitoh	40	Dewi Rahmawati
9	Surya Murni Pangesti	41	Bianca Kartika Sari
10	Santi Widiastuti	42	Nurbaiti Rohmani
11	Irvan Afrialdi Awaludin M	43	Rd. Muhamad Billy Almalik
12	Juliana Tikka Murni	44	Annisa Lestari
13	Andhyta Andam Nadia	45	Andhini Sayu Fauzia
14	Khairuddin	46	Olfiziana Tri Hastuti
15	Ditya Zuliana	47	Rizky Kurnia Chaesario
16	Fenny Tri Purnamasari	48	Prana Patrayoga Adiputra
17	Andi Siti Khadijah Baso	49	Ninieck Widiyanti
18	Angga Putri Gardina	50	Rosalia Agustin Shella
19	Chafid Sugianto	51	Hari Kusuma Yuda Tama
20	Sri Haryanti	52	Intan Yuri Susanti
21	Adam Ghuzale Ramadhan	53	Hersinta Setiarini
22	Purwanto	54	Rumaisha
23	Fithatue Amalia Fatla Aini	55	Muchtar Hadi Saputra
24	Didi Ahmadi	56	Yunita Nurwulantari
25	Iman Sudjudi	57	Haifa Arief Lubis
26	Donny Yuniarto	58	Rumondang Hasibuan
27	Abdul Mun'im Wasi'	59	Puspita Linda Laras Priska
28	Suryo Gilang Romadlon	60	Ika Kurnia Aryani
29	Agusniwam Etra	61	Galuh Tri Astari
30	Riani Anggraini	62	Yuanna Sisilia
31	Ganggas Wibisono	63	Ananda Pria
32	Amriansyah Maulana	64	Achmad Ridwan



JADWAL KEGIATAN
SOSIALISASI DAN BIMTEK KEARSIPAN
BUDAYA SADAR TERTIB ARSIP DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2022

HARI, TANGGAL	JAM	URAIAN	KET
Jumat 13 Mei 2022	09.00 – 09.15	Pembukaan	Elisabeth
	09.15 – 10.30	Evaluasi Pengelolaan Arsip	Arsiparis – Tim IT
	10.30 – 11.30	Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik	Kasiman
	11.30 – 13.30	ISHOMA	
	13.30 - 14.30	Pemberkasan	Sunarti – Tim IT
	14.30 – 15.00	Entry Meeting Pengawasan Internal	Kasiman dan Sunarti
Bulan Mei - Juni	08.30 – 10.00	Pendampingan ke Unit Kerja	Arsiparis sesuai tugas dan jadwal



**DAFTAR NAMA PESERTA
SOSIALISASI DAN BIMTEK KEARSIPAN
BUDAYA SADAR TERTIB ARSIP DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2022**

1	Elisabeth	33	Riska Aprian
2	Kasiman	34	Indra Pandu Wibowo Purwanto
3	Sunarti	35	Rika Dewi Andryani
4	Ardli Nuryadi	36	Siwi Kartikasari
5	Kin Isura Ginting	37	Sri Rustiningrum
6	Medi Kurniadi	38	Basuki
7	Erna Hasanah	39	Faizal Fajar Insani
8	Elling Masitoh	40	Dewi Rahmawati
9	Surya Murni Pangesti	41	Bianca Kartika Sari
10	Santi Widiastuti	42	Nurbaiti Rohmani
11	Irvan Afrialdi Awaludin M	43	Rd. Muhamad Billy Almalik
12	Juliana Tikka Murni	44	Annisa Lestari
13	Andhyta Andam Nadia	45	Andhini Sayu Fauzia
14	Khairuddin	46	Olfiziana Tri Hastuti
15	Ditya Zuliana	47	Rizky Kurnia Chaesario
16	Fenny Tri Purnamasari	48	Prana Patrayoga Adiputra
17	Andi Siti Khadijah Baso	49	Niniek Widiyanti
18	Angga Putri Gardina	50	Rosalia Agustin Shella
19	Chafid Sugianto	51	Hari Kusuma Yuda Tama
20	Sri Haryanti	52	Intan Yuri Susanti
21	Adam Ghuzale Ramadhan	53	Hersinta Setiarini
22	Purwanto	54	Rumaisha
23	Fithatue Amalia Fatla Aini	55	Muchtar Hadi Saputra
24	Didi Ahmadi	56	Yunita Nurwulantari
25	Iman Sudjudi	57	Haifa Arief Lubis
26	Donny Yuniarto	58	Rumondang Hasibuan
27	Abdul Mun'im Wasi'	59	Puspita Linda Laras Priska
28	Suryo Gilang Romadlon	60	Ika Kurnia Aryani
29	Agusniwam Etra	61	Galuh Tri Astarti
30	Riani Anggraini	62	Yuanna Sisilia
31	Ganggas Wibisono	63	Ananda Pria
32	Amriansyah Maulana	64	Achmad Ridwan

JADWAL KEGIATAN
SOSIALISASI DAN BIMTEK KEARSIPAN
BUDAYA SADAR TERTIB ARSIP DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2022

HARI, TANGGAL	JAM	URAIAN	KET
Jumat 13 Mei 2022	09.00 – 09.15	Pembukaan	Elisabeth
	09.15 – 10.30	Evaluasi Pengelolaan Arsip	Arsiparis – Tim IT
	10.30 – 11.30	Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik	Kasiman
	11.30 – 13.30	ISHOMA	
	13.30 - 14.30	Pemberkasan	Sunarti – Tim IT
	14.30 – 15.00	Entry Meeting Pengawasan Internal	Kasiman dan Sunarti
Bulan Mei - Juni	08.30 – 10.00	Pendampingan ke Unit Kerja	Arsiparis sesuai tugas dan jadwal



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1416//KP.02.00/04/2022
Hal : Tugas Belajar

04 April 2022

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
di Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasri Puspita Ainun
NIP : 198612162010122001
Pangkat Gol./Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
Unit Kerja : Biro Humas dan Protokol

Dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri, sesuai Lampiran SE Menpan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk dapat menempuh Pendidikan Master in Public Administration, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom. Terkait hal tersebut, mohon kiranya Bapak Sekjen dapat memberikan persetujuan atas permohonan tugas belajar dimaksud.

Demikian permohonan ini Saya susun untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatian dan perkenan Bapak Sekjen, Saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui Atasan Langsung,
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,

Hormat Kami,

Budi Wijayanto

Hasri Puspita Ainun

Mengetahui,
Kepala Biro Humas dan Protokol,

Heru Setiawan

Tembusan :
Yth. Kepala Biro SDM dan Organisasi.



Digital Signature
mk583112708220404074528

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

Nomor 1429/2200/KP.02.00/04/2022

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Biro SDM dan Organisasi
Perihal : Telaah Permohonan Tugas Belajar Sdri. Hasri Puspita Ainun
Tanggal : 04 April 2022

Sehubungan dengan Surat Permohonan Tugas Belajar yang diajukan oleh Sdri. Hasri Puspita Ainun pada 04 April 2022 untuk menempuh Pendidikan Master in Public Administration University of Birmingham, United Kingdom, dengan hormat dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Rujukan Peraturan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatur mengenai Pengembangan Kompetensi pada Pasal 211 ayat (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 210 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Edaran (SE) Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi PNS melalui Jalur Pendidikan, disebutkan bahwa Persyaratan dan Penetapan Tugas Belajar sebagai berikut :
 - a. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak sedang:
 - 1) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukum disiplin berat; atau
 - 3) Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. Tidak pernah :
 - 1) Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;



- h. Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
 - i. Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas utama pembangunan nasional;
 - j. Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf I ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan persyaratan tugas belajar sebagai berikut :
- a. usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS untuk pendidikan program sarjana;
 - b. usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS untuk pendidikan program magister;
 - c. usia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS untuk pendidikan program magister bagi Jabatan Fungsional Peneliti;
 - d. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS untuk pendidikan program doktor;
 - e. usia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS untuk pendidikan program doktor bagi Jabatan Fungsional Peneliti;
 - f. masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak selesai mengikuti tugas belajar sebelumnya;
 - g. bidang ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja;
 - h. program studi sarjana dan magister di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat akreditasi A dan program studi doktor di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat akreditasi paling kurang B dari lembaga yang berwenang;
 - i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun tingkat berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - k. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan;
 - l. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sasaran kinerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik;
 - m. menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh atasan langsung (pejabat eselon II/ sederajat) menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
4. Persyaratan Umum Pendaftaran Beasiswa PNS, TNI, dan POLRI pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Telah menyelesaikan studi program diploma empat (D4) atau sarjana (S1) untuk beasiswa magister; program magister (S2) untuk beasiswa doktor; atau diploma empat (D4)/sarjana (S1) langsung doktor. Bagi pendaftar dari diploma empat (D4)/sarjana (S1) langsung doktor wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki LoA *Unconditional* dari Perguruan Tinggi tujuan; dan
 - 2) Memenuhi seluruh kriteria sebagai pendaftar program beasiswa Doktor (S3).



- c. Pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister (S2) tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister dan pendaftar yang telah menyelesaikan studi doktor (S3) tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa doktor.
- d. Bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya, wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui laman <https://ijazahln.kemdikbud.go.id/ijazahln/>
- e. Tidak sedang menempuh studi (*on going*) program magister untuk tujuan program magister ataupun doktor untuk tujuan program doktor baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri;
- f. Tidak sedang mendaftar, akan menerima, atau menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding selama menjadi penerima beasiswa LPDP.

B. Telaahan

1. Sdri. Hasri Puspita Ainun telah memperoleh Tugas Belajar untuk jenjang Magister Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2011 s.d. 2013 dengan pembiayaan pendidikan yang berasal dari APBN;
2. Berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Belajar, di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi belum pernah memiliki preseden mengenai Tugas Belajar untuk jenjang pendidikan yang sama;
3. Pada Persekjen tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar, tidak pernah diatur mengenai mekanisme pemberian Tugas Belajar pada jenjang pendidikan yang sama.

C. Kesimpulan

1. Mempertimbangkan Huruf A mengenai Rujukan Peraturan dan Huruf B mengenai Telaahan tersebut di atas, kami mohon arahan Bapak Sekjen mengenai kebijakan pemberian Tugas Belajar Sdri. Hasri Puspita Ainun;
2. Namun dapat kami sampaikan pula bahwa apabila rujukan peraturan tersebut belum dapat mengakomodir penugasan pada jenjang pendidikan yang sama, pelaksanaan pendidikan pada jenjang yang sama di luar negeri dapat diberikan melalui mekanisme Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Sekjen, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi
Teguh Wahyudi

